

BAB III

KERJA SAMA ANTARA INDIA DAN BANGLADESH DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA

Hubungan bilateral India-Bangladesh telah terjalin sejak lama. India adalah negara pertama yang mengakui Bangladesh sebagai negara merdeka pada Desember tahun 1971. Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan bahwa banyak hal yang membuat India dan Bangladesh seperti tidak dapat dipisahkan. Selain karena letak geografis kedua negara yang saling berbatasan, faktor warisan budaya, sejarah, tradisi, bahasa, bahkan musik, tarian dan segala bentuk seni menjadikan kedua negara memiliki hubungan yang erat. Meskipun sempat mengalami berbagai konflik, namun India dan Bangladesh semakin memperluas jangkauan kerja sama bilateral antar kedua negara. Di tahun 2015, India dan Bangladesh telah menyepakati adanya kerja sama dalam upaya mengatasi perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, di wilayah India-Bangladesh.

Pada bab ini penulis pertama-tama menjelaskan sedikit mengenai bagaimana hubungan bilateral kedua negara bermula. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai kerja sama India dan Bangladesh dalam mengatasi perdagangan manusia dan letak kegagalan kerja sama tersebut. Pada sub bab berikutnya penulis memaparkan upaya-upaya yang dilakukan kedua negara dalam mengatasi terjadinya perdagangan manusia di wilayah India-Bangladesh.

A. Bentuk-Bentuk Kerja Sama India dan Bangladesh Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia dan Kegagalannya

Hubungan bilateral India-Bangladesh semakin lebih baik dan memiliki jangkauan yang lebih luas dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai konflik seperti sengketa batas wilayah, konflik sumber air dan imigran

gelap telah mendewasakan kedua negara. Diluar berbagai konflik yang terjadi, India dan Bangladesh sadar akan saling hubungan yang saling membutuhkan. Memiliki kesamaan latar belakang negara, budaya, tradisi, sejarah, bahasa, etnis, dan seni juga menjadi alasan kedua negara dapat hidup berdampingan dengan damai.

India merupakan negara yang berperan besar dalam membantu kemerdekaan Bangladesh. Namun beberapa tahun setelah merdeka di tahun 1980-an, Bangladesh merasakan kekuatan India yang sedikit mengintimidasi negara-negara lainnya di Asia Selatan. Dalam pandangan Bangladesh, India terlalu percaya diri dengan wilayahnya dan sumber dayanya yang besar, sehingga memposisikan diri sebagai negara yang mampu menjaga stabilitas regional, serta melakukan beberapa intervensi kepada negara lain. Konflik juga terjadi di wilayah perbatasan India-Bangladesh selama berpuluh-puluh tahun atas batas wilayah dan status kewarganegaraan penduduk yang masih tidak jelas. Namun di tahun 2015 konflik tersebut berakhir dan penduduk telah memilih kewarganegaraan mereka.

Di tahun 2015, berbagai penandatanganan dilakukan oleh India dan Bangladesh yang menyangkut kerja sama bilateral. Kerja sama tersebut meliputi protokol penukaran instrumen perjanjian batas tanah, perjanjian antar pemerintah, protokol atau program antar pemerintah, MoU antar pemerintah dan adopsi pernyataan antar pemerintah. Jumlah total terdapat 22 perjanjian, MoU atau dokumen lainnya ini selama periode Juni 2015 antara India dan Bangladesh (Ministry of External Affairs, Government of India, 2015). Salah satu MoU yang ditandatangani tersebut adalah MoU antara Pemerintah India dan Pemerintah Bangladesh Dalam Kerja Sama Bilateral Pencegahan Perdagangan Manusia. MoU tersebut ditandatangani kedua negara pada 6 Juni 2017 di Bangladesh. MoU ini berisi delapan bagian dengan 17 pasal.

Di dalam MoU tersebut, bagian III pasal 3-5 membahas mengenai pencegahan perdagangan manusia.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa India dan Bangladesh melakukan pencegahan perdagangan manusia di masing-masing negara dengan meningkatkan pengawasan dan kontrol di daerah perbatasan guna mendeteksi tindakan kejahatan tersebut, meningkatkan pendidikan, kesadaran hidup, keterampilan dasar bekerja, dan memberikan referensi kepada masyarakat mengenai perdagangan manusia. Sedangkan pasal 5, *The Anti-trafficking Cells and Task Forces* akan melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi pemerintah terkait program peningkatan kesadaran dan pembentukan mekanisme masyarakat, berbagi data dan informasi melalui *focal point* yang ditunjuk dari Kementerian Dalam Negeri masing-masing negara, melakukan patroli terkoordinasi secara bersamaan oleh pasukan penjaga perbatasan India dan Bangladesh, mengaktifkan titik nodal, pertemuan rutin komando lapangan serta melakukan pemeriksaan kegiatan perekrutan tenaga kerja dan agen perjalanannya melalui pihak yang berwenang.

Perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak-anak terdapat pada bagian IV dari MoU dari pasal 6 hingga 10. Di pasal 8 disebutkan pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM bila memang diperlukan dalam memberikan tempat penampungan, perawatan, akses hukum dan bantuan lain yang diperlukan korban. Sedangkan bagian V berisi repatriasi pada pasal 11. Proses pemulangan korban ke negara asalnya ini harus berjalan dengan cepat dan bila terjadi penundaan lebih dari 6 bulan, maka dapat dibawa ke otoritas yang lebih tinggi. Untuk lebih lengkapnya, MoU terlampir di bagian belakang dari karya tulis ini.

Kerja sama India-Bangladesh dalam mengatasi perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak direalisasikan melalui RRRI (*Rescue, Recovery, Repatriation and Integration*) atau penyelamatan, pemulihan, pemulangan korban ke negara asal dan integrasi korban kembali. Dalam laporan Kementerian

Luar Negeri India tertera bahwa lingkup kerja sama ini meliputi kerja sama memperkuat pencegahan seluruh bentuk perdagangan manusia, terutama yang terjadi kepada perempuan dan anak-anak; melakukan penyelamatan, pemulihan, memastikan investigasi dan penuntutan hukuman terhadap pelaku dan sindikat kejahatan terorganisir di salah satu negara dengan cepat, serta melakukan repatriasi korban sesegera mungkin. Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah adalah melakukan reintegrasi terhadap korban yang akan dilakukan oleh negara asal secara efektif dan aman (Ministry of External Affairs, Government of India, 2015).

Dalam kurun waktu 6 bulan semenjak terjalannya kerja sama tersebut, satuan tugas RRRI telah mengadakan pertemuan hingga 5 kali guna saling bertukar informasi kasus dan memperbaiki sistem penyelamatan dan pemulangan korban. Di tahun 2016, dari puluhan ribu jumlah total korban perdagangan manusia di India, hanya ratusan diantaranya yang berasal dari Bangladesh yang berhasil diselamatkan. Padahal jumlah korban perempuan dan anak-anak dari Bangladesh ke India dapat mencapai 400 per bulannya. Korban yang berasal dari Bangladesh ditampung di rumah singgah di Kolkata dan Bihar agar memudahkan proses pemulangan.

Dalam SOP-nya, India dan Bangladesh menyediakan 8 kerangka kerja normatif maupun praktik. Yang pertama adalah identifikasi dan penyelamatan korban. Kedua, *entry* data terkait satuan tugas. Ketiga, penempatan dan pengumpulan informasi korban. Keempat, saling bertukar informasi antar satuan tugas. Kelima, proses administrasi. Keenam dan ketujuh adalah mengurus segala perijinan pemulangan korban dan pemulangan korban (fisik). Yang terakhir adalah penerimaan korban yang dipulangkan oleh negara asalnya. Selain itu terdapat *website* yang digunakan untuk memberikan informasi terkait kegiatan satuan tugas RRRI dari kedua negara.

Setelah terjalin kerja sama tersebut, angka perdagangan manusia di kedua negara tidak mengalami penurunan yang berarti, bahkan cenderung meningkat. Bangladesh sendiri menjadi negara pemasok perdagangan manusia dan imigran gelap terbanyak di India. Banyaknya kasus yang dilaporkan, namun sebagian besar pelaku bebas akibat kurangnya bukti, serta korban tidak mendapatkan hak perlindungan menjadi keprihatinan banyak pihak.

Penanganan terhadap kasus perdagangan manusia cenderung berjalan lambat. Proses pemulihan terhadap korban perdagangan manusia di India dan Bangladesh juga belum mencukupi. Korban yang telah diamankan, untuk sementara ditampung sebelum akhirnya dikembalikan ke tempat asalnya. Beberapa organisasi non pemerintah membantu ikut membantu dalam menangani korban. Namun biro sosial setempat yang menangani korban kurang mendapatkan distribusi dana, sehingga proses evakuasi, pemulihan dan repatriasi tidak berjalan maksimal. Kurangnya tenaga kerja dan rumah rehabilitasi (tempat penampungan sementara) yang memadai dari pemerintah masing-masing negara, baik India maupun Bangladesh, menyulitkan untuk menangani pemulihan tersebut.

Akses untuk pemulangan korban juga tidak dipermudah oleh kepolisian dan pengadilan terkait. Tidak jarang korban harus menunggu proses hukum hingga lebih dari 1 tahun sebelum akhirnya dipulangkan ke negara asalnya. Kebanyakan korban tertunda akibat proses hukum dimana korban merupakan saksi dari kasus kejahatan tersebut, sehingga terjadi ketidaksamaan tujuan dalam melindungi korban oleh LSM dan pengadilan setempat. Pengadilan akan sulit untuk memberikan perintah repatriasi korban selama proses peradilan kasus kejahatan tersebut belum selesai. Korban perdagangan manusia dari Bangladesh yang diselamatkan di India sebagian besar harus melalui proses hukum yang rumit dan berlapis. Dalam beberapa kasus, korban yang diseludupkan bahkan

turut dikenai tuntutan hukuman pidana atau denda sebagai bagian dari kelompok imigran gelap, bukan sebagai korban perdagangan manusia dan kepolisian setempat menutup mata atas adanya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Koordinasi dan keterbukaan informasi yang kurang dari satuan tugas RRRI masing-masing negara juga menjadi penghambatan proses peradilan. Tidak adanya perintah yang jelas dari pemerintah membuat tugas dari badan ini sedikit buram.

Hambatan pemulangan korban tidak hanya berasal dari lembaga-lembaga pemerintah kedua negara saja, namun juga berasal dari korban sendiri. Sebagian besar korban yang diselamatkan dan ditampung di rumah singgah tidak memberikan data diri yang sebenarnya guna penyelidikan lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan banyak waktu yang terbuang untuk mencari informasi alamat korban yang sebenarnya. Kebanyakan korban tidak ingin mereka dipulangkan ke tempat asalnya di Bangladesh dengan alasan tidak ingin keluarga mengetahui apa yang telah mereka alami.

Setelah dipulangkan, banyak dari korban yang justru tidak diterima kembali oleh keluarganya. Korban yang sebelumnya telah meninggalkan rumah dianggap ikut membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Banyak korban yang harusnya menerima pembekalan keterampilan dasar, penyembuhan dan reintegrasi di negara asalnya justru tidak mendapatkan apapun. Beberapa LSM Bangladesh mendapati bahwa kebanyakan korban berasal dari keluarga miskin ekstrim, sehingga proses integrasi oleh keluarga tidak dapat dilakukan. Pemerintah seharusnya dapat memberikan sosialisasi terhadap korban dan keluarganya agar dapat dimengerti oleh keluarga mengenai martabat korban, serta perekonomian keluarga. Korban yang tidak diberikan pembekalan keterampilan dasar dalam bekerja dan pengetahuan tentang penipuan kerja serta motivasi dalam membangun usaha atau mencari

pekerjaan lain tidak jarang kembali terjerumus ke dalam perdagangan manusia.

B. Upaya Masing-Masing Negara

Kerjasama bilateral India dan Bangladesh dalam upaya mengatasi perdagangan manusia ini bagaimana pun belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Namun upaya-upaya yang dilakukan dari dan di masing-masing negara tetap mengacu pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

1. Upaya India dalam mengatasi perdagangan manusia

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri India, *The Immoral Traffic (Prevention) Act* tahun 1956 adalah undang-undang utama pencegahan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seks komersial di India (Ministry of External Affairs, Government of India, 2018).

Dalam *Indian Penal Code (IPC)* telah mengatur berbagai peraturan, hukuman dan perlindungan terkait perdagangan manusia. KUHP ini dibuat berdasarkan standar protokol PBB. *IPC section 370-374* mengatur sanksi terhadap perdagangan manusia dalam bentuk, cara dan tujuan apapun, baik untuk eksploitasi termasuk gadis dibawah umur untuk seks komersial, jual-beli prostitusi, perbudakan dan kerja paksa. Hukum Pidana (amandemen) 2013 telah memberlakukan 370 dan 370A IPC.

Pada Konstitusi India pasal 23 ayat 1 berisi larangan kegiatan perdagangan manusia, pemaksaan mengemis dan segala macam bentuk kerja paksa. Disebutkan pula di pasal 24 Konstitusi India larangan bagi anak usia dibawah 14 tahun untuk bekerja di pabrik atau pertambangan atau pekerjaan berbahaya lainnya.

Undang-undang lain yang berlaku adalah *Protection of Children from Sexual offences (POCSO) Act* tahun 2012. Undang-undang ini merupakan hukum khusus yang untuk melindungi anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi seksual dan lebih terperinci. Undang-undang lainnya yaitu UU Larangan Pernikahan Anak tahun 2006, UU Sistem Buruh Kontrak (abolisi) tahun 1976 dan UU Pekerja Anak (Larangan & Peraturan) tahun 1986. Tidak hanya undang-undang, upaya India juga dapat dilihat melalui tindakan meratifikasi *United Nations Convention on Transnational Organised Crime (UNCTOC)* dan Konvensi SAARC dalam Mencegah dan Memerangi Perdagangan Prostitusi Perempuan dan Anak (Ministry of External Affairs, Government of India, 2018).

Selain itu pada Konstitusi India pasal 15, terdapat larangan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Pada pasal 16 (1) dituliskan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama berkaitan dengan pekerjaan atau pengangkatan ke kantor manapun di bawah negara.

Di tahun 1976, Kementerian Pembangunan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial India mendirikan *Bureau of Manpower, Employment and Training* untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam dan ekspor luar negeri, terlibat dalam perencanaan dan implementasi pemanfaatan sumber tenaga kerja di India. Biro ini memiliki berbagai *training center* di kota-kota di India. Didirikannya biro ini menjadi salah satu upaya membangun tenaga kerja ekspor yang berkualitas, setidaknya memiliki keterampilan dasar, agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Penjagaan keamanan di wilayah perbatasan oleh *Borders Security Force (BSF)* India. Patroli teratur, pengecekan identitas, keamanan yang ketat telah dilakukan. Selain itu BSF juga bekerja sama dengan

UNODC dan NGO setempat dalam membantu penyelamatan korban di perbatasan, memberikan tempat penampungan sementara sebelum dipulangkan ke negara asalnya. Terdapat rumah rehabilitasi korban di Bihar. Di tahun 2012 BSF mengikuti workshop yang diselenggarakan UNODC guna memperbaiki proses identifikasi korban dan penanganan dan pengobatan yang tepat bagi korban.

Selain itu pemerintah India memberikan biaya sekolah gratis dari kelas 1 SD hingga kelas 2 SMP. Diharapkan dengan pendidikan gratis ini dapat setidaknya meringankan biaya untuk anak-anak agar dapat bersekolah. Beberapa NGO maupun INGO melakukan campaign dan sosialisasi kejahatan perdagangan manusia kepada masyarakat melalui media konvensional, secara langsung, elektronik, cetak dan sebagainya. Pemanfaatan media sosial juga digunakan dalam memberikan edukasi mengenai masalah tersebut.

Berbagai upaya di atas telah dilakukan di India bahkan sebelum perjanjian kerjasama ini dibuat. Dalam realisasinya, beberapa UU tidak dilaksanakan dengan baik. Tuntutan dari LSM untuk memberikan perlindungan, penyembuhan dan pemulangan korban, tidak sejalan dengan pemerintahan India untuk menyelesaikan dan menuntut pelaku kejahatan tersebut. Penyelesaian kasus menjadi memiliki proses yang kompleks, yang berakibat pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulangkan korban ke daerah asalnya.

Praktek korupsi dari pemerintah dan kepolisian setempat juga tidak jarang ditemukan dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia. Hal ini menyebabkan pelaku terbebas dari hukuman dan melakukan tindak kejahatan yang sama. Beberapa korban dibantu dalam proses pemalsuan identitas agar tidak dapat dilacak. Meskipun dalam realisasinya masih

banyak kekurangan, namun India berupaya penuh untuk mencegah, mengurangi, menekan dan memberikan hukuman perdagangan manusia di negaranya.

2. Upaya Bangladesh dalam mengatasi perdagangan manusia

Seperti halnya India, pemerintah Bangladesh mengatur undang-undang terkait perdagangan manusia di negaranya. Dalam *Banglades Penal Code*, penculikan, pemaksaan, perbudakan dan kerja paksa diatur pada *section* 359-374. Pada *section* 370 dan 371 mengatur mengenai perbudakan, sedangkan 372 dan 373 berisi penjualan dan pembelian anak dibawah umur dengan tujuan prostitusi, dan 374 mengatur tentang kerja paksa. Selanjutnya di *section* 464 mengatur tentang pembuatan dokumen palsu dan penyalahgunaannya.

Dalam Konstitusi Bangladesh telah diatur dalam pasal 20 (2) bahwa negara haru memastikan tidak adanya rasa tidak menyenangkan akibat pembayaran gaji yang tertunda. Pasal 27 berisikan tentang seluruh warga negara sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama. Pasal 29 (1) mengatakan bahwa seluruh warga berhak atas kesempatan kerja yang sama, sementara pada 29 (2) dikatakan tidak ada diskriminasi atau tidak diterima yang berkaitan dengan pekerjaan berdasarkan agama, ras, kasta, jenis kelamin dan tempat tinggal. Pasal 31 berisi hak untuk mendapat perlindungan hukum. Pasal 32 berisi hak untuk hidup dan kebebasan individu, serta di pasal 34 berisi larangan kerja paksa.

Pada *Suppression of Immortal Traffic Act* tahun 1933, *section* 4 mengatur hukuman terkait rumah bordil. Sedangkan *section* 7-12 mengatur tentang pelacuran, hukuman bagi yang mengambil keuntungan dari prostitusi, hukuman bagi yang mehanan anak dibawah umur dengan tujuan prostitusi dan sebagainya.

Undang-undang lainnya yaitu pada *Repression of Violence Against Women and Children Act* pasal 5 dan 6, UU Tenaga Kerja Bangladesh tahun 2006, UU Anak Kerja tahun 1974, UU Ekstradisi tahun 1974, UU *Human Trafficking Deterrence And Suppression* tahun 2012 dan UU Migrasi dan Tenaga Kerja Luar Negeri tahun 2013.

Selain itu, penjagaan perbatasan oleh *Border Guards Bangladesh* (BGB) juga semakin diperketat. Meski masih banyak penyeludupan imigran di Bangladesh, namun usaha pemerintah dibantu oleh NGO membuahkan hasil. Polisi Bangladesh telah melakukan penyelamatan ratusan orang imigran gelap dengan tujuan Malaysia di Teluk Bengal. *UN Migration Agency* (IOM) telah melakukan penyelamatan terhadap pengungsi Rohingya yang diketahui menjadi korban perdagangan di Cox's Bazar. BGB juga melakukan pertemuan pada November 2017, untuk mendesak Myanmar untuk merepatriasi pengungsi Rohingya yang berada pada *camp-camp* di perbatasan Bangladesh-Burma.

Pemerintah Bangladesh dan beberapa NGO telah mengusahakan untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua atas bahaya pernikahan anak. Meski belum terlaksana, Perdana Menteri Hasina berjanji untuk menghentikan pernikahan dibawah usia 15 pada tahun 2021 mendatang dan pernikahan anak dibawah usia 18 pada tahun 2041.

Tidak hanya India, pemerintah Bangladesh juga memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak Bangladesh. Pemerintah Bangladesh juga membuka lahan pekerjaan bagi perempuan. Meskipun pada sektor yang rendah dan upah yang rendah pula. Namun usaha ini menjadi salah satu upaya meningkatkan angka partisipasi pekerja perempuan dan membantu perkembangan ekonomi Bangladesh.

Kekurangan upaya Bangladesh terlihat dari bagaimana penegakkan hukum atas kasus ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Beberapa kasus berakhir dengan ketidakjelasan. Korban dipulangkantampa dilakukan proses integrasi. Pelaku tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya. Penjagaan pada titik transit di sepanjang perbatasan masih terbilang longgar, beberapa petugas diketahui disuap untuk mempermudah pelaku memindahkan korban-korban yang diseludupkan ke India.

